

KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERLAKUAN DISKRIMINASI KEPADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Merryany T. Bawole¹

Abstrak

Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan dan merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia PSK merupakan bagian dari masyarakat yang sering mengalami perlakuan diskriminasi baik secara hukum dan sosial. PSK juga merupakan individu dan warga Negara yang memiliki hak asasi manusia oleh sebab itu dengan alasan apapun PSK tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi karena perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia PSK pun perlu dilindungi dan ditegakkan demi terpenuhinya hak asasi dan kebebasan dasar para PSK.

Key words: Diskriminasi, Pekerja Seks Komersial, Hak Asasi Manusia.

A. PENDAHULUAN

Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi Negara Indonesia melalui Pasal 28 pada dasarnya memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya termasuk juga hak untuk bekerja dan memilih pekerjaannya. Kenyataannya terdapat sebagian kelompok masyarakat yang setiap harinya mendapatkan perlakuan diskriminasi kemanapun mereka pergi, akibat pekerjaan yang dilakukan yaitu sebagai pekerja seks komersial yang biasa dikenal dengan sebutan PSK.

PSK selain meresahkan karena selalu dianggap sebagai sampah atau penyakit masyarakat juga dianggap sebagai salah satu sarana penyebaran penyakit HIV/AIDS akibat perilaku seks.² Tak bisa dipungkiri walaupun kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang dilarang karena bertentangan dengan moral, agama dan budaya namun dari waktu ke waktu kegiatan prostitusi terus berkembang bahkan semakin terorganisir dan professional. Menurut Merton, bahwa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu di masyarakat untuk bertindak menyimpang dari pada

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² Fajar Ade Satyawati Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Klaten), SKRIPSI, Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3-4.

mematuhi norma-norma sosial.³ Oleh karena itu tiap orang memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan apa yang ingin dipilih untuk dijalankan agar dapat mempertahankan kehidupannya. Kebebasan tersebut seakan tanpa batas sehingga kegiatan prostitusi pun dapat dipilih untuk dijadikan sebagai pekerjaan untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupan seseorang.

Konstitusi juga melalui Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hal tersebut berarti bahwa setiap orang tidak boleh mengalami perlakuan diskriminasi dalam bentuk apa pun dengan alasan apapun. Perlakuan diskriminasi merupakan suatu pelanggaran HAM dan bertentangan dengan konsep HAM tentang persamaan dan keadilan yang dijunjung oleh HAM yang berhak dinikmati oleh setiap orang. Oleh karenanya, Diskriminasi merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan hukum dan dimana ada tindakan diskriminasi maka terdapat pelanggaran hak asasi manusia disana. Oleh karenanya merupakan hak PSK untuk mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dilindungi oleh hukum.

Walaupun demikian tak dapat diingkari sampai saat ini bekerja sebagai PSK merupakan pekerjaan yang dilarang karena bertentangan dengan moral, agama, dan budaya. Namun, pekerjaan tersebut tetap ada. Pelaku dan pengguna pun semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan, pekerjaan ini tidak dapat dihilangkan dari masa ke masa. Sebagai bukti banyak catatan sejarah yang menyatakan bahwa PSK merupakan salah satu profesi yang tertua di dunia.

Kehidupan PSK tidak dapat dihindari dari perlakuan diskriminasi yang mereka hadapi setiap harinya. Tindakan diskriminasi yang sering dialami oleh PSK ini antara lain peraturan perundang-undangan mendiskriminasi PSK dengan melarang adanya praktek prostitusi membuat PSK menjadi suatu perbuatan yang dilarang tanpa memberikan solusi yang tepat apa yang harus dikerjakan oleh PSK sebagai sumber mata pencarian yang lebih layak. Karena merupakan pekerjaan yang tidak diakui oleh undang-undang maka tidak ada hukum yang memberikan perlindungan kepada para PSK terjadi kekosongan hukum untuk menjadi dasar hukum perlindungan bagi para PSK sebagai individu yang juga memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh hukum. Walaupun sebagai pekerjaan yang pada umumnya dilarang karena bertentangan dengan nilai moral dan budaya masyarakat, pekerja seks komersial juga merupakan seorang pribadi manusia yang memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi dan memiliki

³ Bambang Ali Kusumo, 1997, *Kriminologi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Hal. 40.

kedudukan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan didalam hukum serta berhak mendapat perlindungan demi terjaminnya hak-hak mereka.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi Perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlakuan diskriminasi terhadap pekerja seks komersial?
2. Bagaimana penegakan dan perlindungan HAM bagi para pekerja seks komersial?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dan penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahannya yaitu pendekatan yuridis normatif serta didukung dengan data primer lapangan sebagai pendukung. Adapun jenis atau tipe dalam penelitian ini bersifat deskriptif.⁴ Selain itu, penelitian ini sifatnya kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder dan data tersier dalam menunjang penelitian dan penulisan. Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian selama 4 bulan terhitung sejak Oktober 2012 sampai Februari 2013.

Dan menggunakan teknik studi kepustakaan dan metode analisis data yaitu data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu analisis normatif karena bertitik tolak dari norma hukum positif. Kemudian kualitatif dimaksudkan analisis data.⁵

D. PEMBAHASAN

1. Diskriminasi Terhadap PSK

Seseorang memilih untuk menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK) pada dasarnya dipengaruhi oleh hal-hal tertentu yang menjadi faktor pendorong. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi karena kemiskinan yang membuat seseorang memilih untuk mendapatkan materi dengan cara yang cepat dan mudah tanpa adanya keahlian khusus atau pun pendidikan membuat seseorang memilih untuk bekerja sebagai PSK. Faktor sosial baik keluarga yang retak sehingga kurangnya kasih orang tua kepada anak pun menjadi penyebab seseorang bisa terjerumus dalam kehidupan ssebagai pekerja seks termasuk juga lingkungan sekitar yang mendorong seseorang memilih menjadi PSK. Faktor budaya adanya kebiasaan dalam lingkungan sosial tertentu yang mengakibatkan lingkungan tersebut dominan

⁴Bambang Sungono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 35.

⁵*Ibid*, Hal. 98.

dengan seseorang yang memilih menjadi seorang PSK. Faktor Pendidikan seperti kurang pendidikan formal dan pendidikan agama sehingga mengakibatkan kurangnya etika dan moral seseorang sehingga dengan mudahnya memilih untuk menjadi seorang PSK dengan penghasilan yang besar secara singkat. Faktor lainnya seperti akibat dijebak dan akhirnya sulit untuk keluar dari dunia prostitusi serta adanya keinginan dari diri sendiri untuk memilih bekerja sebagai PSK tanpa adanya dorongan dari lingkungan ataupun orang lain.

Adapun bentuk bentuk diskriminasi yang sering dialami oleh para pekerja seks komersial dalam kehidupan yaitu diskriminasi secara hukum dan sosial. Diskriminasi secara hukum yang dimaksud adalah diskriminasi terhadap PSK diranah hukum baik dengan adanya aturan nasional maupun peraturan daerah yang melarang keberadaan para wanita tuna susila mengakibatkan tidak adanya aturan hukum yang dapat menjadi payung perlindungan bagi para PSK sebagai individu baik dalam menjalankan pekerjaannya maupun dalam menghadapi konsekuensi permasalahan yang terjadi ketika mereka menjalani pekerjaan tersebut.

Pelanggaran kewajiban untuk menghormati hak ekonomi, sosial dan budaya juga muncul saat suatu negara menerapkan kebijakan , hukum, atau program yang mengacuhkan atau mengingkari kovenan atau saat pengusaha negara bertindak menggunakan cara yang bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan dalam kovenan.⁶ Oleh karenanya terkadang tanpa disadari bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui undang-undang ataupun kebijakan pemerintah daerah oleh peraturan daerah sering mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM karena terjadi pengabaian atau pengingkaran hak-hak yang tertentu oleh pemerintah, seperti contohnya untuk daerah Manado pengabaian hak terhadap PSK terjadi melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan. Perda tersebut membuat terjadi terjadinya diskriminasi terhadap PSK di kota Manado karena membatasi hak yang dimiliki mereka sebagai individu untuk melakukan pekerjaan demi mencari nafkah untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupan mereka baik secara pribadi maupun orang lain.

Selain itu dengan adanya perda tersebut pemerintah tidak mengakui adanya kegiatan prostitusi di Kota Manado karena tidak adanya lokalisasi di Kota Manado. Pelarangan terhadap hadirnya PSK dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan dapat menghentikan perkembangannya. Namun, pada kenyataannya jumlah PSK tersebut bukannya berkurang tetapi bertambah bahkan dengan jumlah yang semakin banyak dari tahun ketahun. Seperti pada pada tahun 2012 dicatat bahwa terdapat 2.000 PSK di Kota Manado yang setiap hari menjual jasa seks kepada sekitar 6.000 pengguna.

⁶ Allan McChesney, *Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Insist Press, Yogyakarta, 2003, hal 38.

Kenyataan ini membuktikan bahwa dikota Manado terdapat PSK yang pertumbuhannya semakin berkembang.

Diskriminasi juga terjadi di ranah hukum menurut Koordinator Perubahan Hukum LBH APIK, FR Yohanna TW yang bercerita tentang apa yang dialami seorang pekerja seks yang mereka dampingi, saat wanita tersebut melapor pada polisi atas kejadian tidak menyenangkan terjadi pada dirinya ke polisi. Justru ia didiskriminasikan saat polisi tahu pekerjaannya, sang pelaku justru tidak ditindak. Atau saat tertangkap razia, maka seorang pekerja seks akan sulit sekali mendapatkan pembelaan hukum. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sukabumi Drs. H. Karmas Supermas, M.M. Karmas merasa keberatan dengan istilah pekerja seks komersial karena mengandung sebuah konsekuensi yang berat dilihat dari kacamata ketenagakerjaan. Pasalnya, di satu sisi wanita yang berprofesi sebagai pelacur disebut pekerja, tetapi di sisi lain pekerja itu tidak pernah mendapat perlindungan, bahkan diobrak-abrik.⁷ Pengertian pekerja sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003. yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tidak adanya batasan dari pengertian tersebut yang mengolongkan bahwa bekerja sebagai pekerja seks komersial bukanlah pekerjaan. Namun keberadaan profesi PSK tidak diakui keberadaannya. Dengan demikian maka pekerja sebagai pekerja seks tidak memiliki payung hukum dari undang-undang untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana seorang pekerja pada umumnya. Padahal dalam kenyataannya para PSK tersebut membutuhkan perlindungan karena sangat mudah mengalami kekerasan.

Selain itu para pekerja seks tersebut sangat rentan terkena penyakit-penyakit akibat resiko pekerjaan. Sebagai bagian dari warga Negara jaminan untuk mendapatkan fasilitas pekerjaan dan jaminan kesehatan seperti yang diatur oleh undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga-kerjaan pun merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh para PSK. Namun karena tidak adanya dasar aturan yang data memberikan mereka perlindungan maka jaminan sosial dan jaminan kesehatan tersebut tidak dapat mereka nikmati. Disinilah terdapat bentuk diskriminasi bagi para PSK dibanding dengan para pekerja yang lain.

Diskriminasi secara sosial yang dimaksud adalah diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat. Diskriminasi ini mencakup cap dan perlakuan masyarakat terhadap para pekerja seks komersial yang mendiskriminasi PSK. Cap yang diberikan oleh Negara melalui Dinas Sosial yang menyatakan PSK sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) yang memiliki konotasi yang sangat negatif dalam masyarakat yang benar-benar melecehkan para PSK.. Selain itu, Stigmatisasi masyarakat yang menganggap bahwa PSK merupakan sampah masyarakat, sumber dosa ataupun hal lain yang pada umumnya

⁷ Iwan Sain, S.Kp,M.Kes, Wanita Tuna Susila WTS atau Pekerja Seks Komersial, di post pada tanggal 24 Oktober 2007

berkonotasi negatif membuat para PSK sangat sulit berbalik pada kehidupan normal. Di samping itu perbuatan main main hakim sendiri itu baik yang terorganisasi dan terencana maupun yang bersifat spontan sering terwujud dalam bentuk tindak kekerasan, pembakaran dan amuk massa terhadap lokalisasi pelacuran.⁸

2. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap PSK

Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber hukum dalam konstitusi yang mengatur larangan tentang diskriminasi terhadap siapapun dengan dasar apapun. Pasal ini menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Itu berarti perlindungan hukum yang diatur dalam konstitusi Negara sebagai sumber tertinggi dari aturan hukum pun mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang mengalami perlakuan diskriminasi dan memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan dari tindakan diskriminasi. Hal ini pun berlaku bagi para pekerja seks yang sering mendapat perlakuan diskriminasi akibat status yang mereka miliki sebagai pekerja seks.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pun menjadi dasar perlindungan hukum bagi setiap orang siapa pun itu untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama didalam hukum dan tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan (Ayat 1), Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Ayat 2), Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi (Ayat 3). Pasal ini pun melindungi setiap individu yang menjadi warga Negara tanpa adanya pembedaa-bedaan. Oleh karenanya pasal ini pun menjadi dasar hukum bagi para pekerja seks komersial untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi yang mereka hadapi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 7 menjadi dasar hukum terhadap larangan perlakuan diskriminasi dengan alasan apa-pun kepada siapapun. Setiap perlakuan diskriminatif merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pasal ini menyebutkan bahwa bahwa semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun berhak atas perlindungan hukum yang sama. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama dari

⁸ Syafruddin, Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakan Hukum, Makalah Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Medan, hal 10-11.

diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan dari hasutan apapun untuk diskriminasi seperti itu. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan suatu kausul non diskriminasi. Ada tiga aspek yang dicakup oleh ketentuan tersebut. Aspek pertama adalah persamaan dimuka hukum. Aspek kedua adalah perlindungan hukum yang sama, dan aspek ketiga adalah perlindungan hukum dari diskriminasi. Keentuan ini pun menjadi dasar perlindungan hukum bagi para pekerja seks komersial untuk mendapatkan perlindungan dan terhindar dari perlakuan diskriminasi.

Pengaturan terhadap hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi terdapat dalam pasal 26 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) Tahun 1966 yang menyebutkan bahwa semua orang adalah sama dihadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Pasal ini pun berlaku bagi setiap warga masyarakat termasuk para pekerja seks yang merupakan bagian dari masyarakat dan juga bagian dari warga Negara yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dari perlakuan diskriminasi. Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 pasal 2 ayat (2) juga mengatur bahwa setiap negara anggota kovenan harus berusaha agar setiap warganya bisa menikmati hak hak mereka tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Tahun 1980 Pasal 1 menyebutkan diskriminasi terhadap wanita akan berarti pembedaan, pengesampingan atau pelanggaran apapun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan oleh wanita dengan mengabaikan status perkawinan mereka, atas suatu dasar persamaan pria dan wanita akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, sipil atau bidang lainnya. Segala pembedaan, pengesampingan atau pelanggaran terhadap hak apapun, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan mengurangi atau meniadakan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak merupakan suatu tindakan diskriminasi. Pembedaan antara posisi wanita dan pria yang dialami oleh para pekerja seks komersial yang lebih sering mengalami tindakan diskriminasi dibanding dengan para pria yang menjadi pengguna jasa. Hal tersebutlah yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh PSK yang sering terabaikan antara lain sebagai berikut yaitu hak atas kebebasan dasar berdasarkan Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam pasal ini menyebutkan hak kodrat manusia yaitu untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali begitu pula dengan kebebasan dasar. Demi mempertahankan kehidupannya manusia memiliki kebebasan dasar untuk

memili jalan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung. Konstitusi Negara Indonesia melindungi hak tersebut.

Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi berdasarkan Pasal 28 I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dalam pasal ini sangat jelas bahwa setiap orang harus bebas dari perlakuan diskriminatif dengan alasan apapun. Alasan status sosial dalam masyarakat yang mencap para PSK sebagai sampah masyarakat ataupun penyakit masyarakat secara langsung telah membuat para PSK tersebut mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat. PSK memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif yang membuat mereka berada dikelas kedua dalam masyarakat dan tidak dihargai keberadaannya, akibat bentuk pekerjaan yang mereka pilih. Selain itu, konstitusi mengatur pula bahwa pihak yang mendapatkan perlakuan diskriminasi tersebut wajib untuk mendapatkan perlindungan. Oleh sebab itu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif tersebut dijamin oleh konstitusi.

Hak untuk diakui sebagai pribadi. Stigmatisasi yang didapat para PSK sebagai sampah masyarakat ataupun sebagai penyakit masyarakat membuat mereka sering tidak diakui sebagai pribadi manusia yang memiliki hak yang sama dengan orang lain. Padahal perundang-undangan mengakui bahwa merupakan hak dari setiap orang untuk dapat diakui sebagai pribadi dimanapun tanpa pembedaan berdasarkan status sosial tersebut. Pasal 5 UU HAM menjadi dasar hukum bagi seseorang diakui sebagai seorang pribadi yang berbunyi setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (ayat 1) dan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak (ayat 3).

Pasal 11 UU HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pasal 38 ayat (2) UU HAM juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan merupakan salah satu hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang hak asasi manusia. Tanpa diskriminasi setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan memiliki hak untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Hak tersebut juga dimiliki oleh para PSK walaupun bagi sebagian kalangan menganggap bahwa yang mereka lakukan bukanlah merupakan pekerjaan karena bertentangan dengan moral namun tak bisa dielakan bahwa bekerja sebagai pemberi jasa layanan seks merupakan pekerjaan yang dipilih oleh sebagian orang dan hal tersebut merupakan hak mereka untuk dilakukan. Terlebih lagi bahwa yang membutuhkan jasa

mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah sehingga membuat jumlah PSK pun semakin bertambah.

Hak atas standar hidup yang layak. Pasal 11 Ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 1966 menyebutkan, negara-negara peserta kovenan ini mengakui hak setiap orang atas taraf hidup yang layak baginya dan keluarganya, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal, dan perbaikan yang terus-menerus dari lingkungannya. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak ini, yang dengan tujuan ini mengakui arti penting yang esensial dari kerjasama internasional atas dasar kesepakatan yang bebas. Negara peserta dalam kovenan ini mengakui hak tiap orang untuk mendapatkan suatu standar kehidupan yang memadai bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang memadai, serta perkembangannya berkesinambungan terhadap kondisi kehidupan.

Negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin realisasi hak ini, mengakui dampak ini terhadap kepentingan esensial dan kerjasama internasional berlandaskan pada persetujuan bebas. Hak atas Perlindungan Hukum. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pekerja seks komersial dianggap bukan sebagai seorang pekerja karena bertentangan dengan moral dan tidak diakui berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 oleh karenanya tidak ada aturan yang melindungi para PSK yang memilih untuk mengambil pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Konstitusi negarapun menghendaki adanya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi siapapun dihadapan hukum. Berdasarkan pasal ini maka setiap orang harus diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan dihadapan hukum. Termasuk juga bagi para PSK. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 28 D (ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta Pasal 3 ayat (1) UU HAM yang menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal ini sejalan dengan pasal dalam konstitusi yang menyatakan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Demi mewujudkan perlindungan HAM bagi PSK maka harus dilakukan dengan adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi HAM karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 71 UU HAM yang menyebutkan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-

undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia tidak akan cukup tanpa adanya langkah-langkah yang konkrit yang diambil oleh pemerintah sebagai bentuk untuk pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Langkah-langkah wajib diambil pemerintah agar hak asasi setiap warga negaranya dapat terpenuhi dan tidak ada yang terabaikan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 72 UU HAM menyebutkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Oleh karenanya dalam pemenuhan hak asasi manusia sangat diperlukan tindakan-tindakan yang efektif dari dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan bidang lainnya demi terpenuhnya hak asasi tiap warga negara tanpa terkecuali.

Salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah adalah dengan melakukan legalisasi prostitusi dalam hal ini pengaturan terhadap kegiatan prostitusi tersebut. Legalisasi prostitusi itu sendiri adalah suatu proses pengesahan dan pengakuan prostitusi sebagai sebuah pekerjaan yang layak yang kemudian diatur dalam Undang-Undang. Pelegalan yang dimaksudkan di sini adalah pelegalan secara terkontrol dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh pemerintah sehingga tidak akan menjadi sebuah penjamuran kegiatan prostitusi yang secara sembunyi-sembunyi dan tidak terkontrol. Tujuan dari adanya legalisasi prostitusi ini adalah pengontrolan dan pengurangan dampak negatif dari prostitusi berkat adanya intervensi pemerintah sebagai pengawas sekaligus pembuat mekanisme. Sebagai timbal balik dari mekanisme yang jelas, akan mengakibatkan adanya pengurangan penderita HIV/AIDS dan akan meringankan beban tanggungan pemerintah untuk menekan jumlah penderita HIV/AIDS yang semakin berkembang di daerah-daerah yang sedang berkembang, menghindari terjadinya prostitusi yang melibatkan anak. Serta mengontrol jumlah PSK yang meningkat akibat adanya kendali hukum dan pemerintah dalam praktek prostitusi.

Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia juga selain membutuhkan peran aktif dari pemerintah tapi juga memerlukan kontrol dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal tersebut dikarenakan oleh seringkali pihak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pihak pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui aturan aturan maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seringkali pihak LSM tersebut berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Oleh karena itu peran LSM juga sangat diperlukan untuk mewujudkan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia lebih khusus lagi hak asasi dan kebebasan dasar para PSK dengan melakukan hal-hal seperti memberi informasi kepada badan internasional HAM ketika

terjadi pelanggaran HAM yang tidak segera ditangani pemerintah, memberi informasi dan saran bagi badan pembuat undang-undang dan legislator dan bekerja sama dengan staf layanan umum demi terjadinya pemenuhan HAM.

Masyarakat pun dapat berperan untuk mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia termasuk pelaksanaan hak PSK agar dapat berjalan tanpa adanya diskriminasi. Selain itu masyarakat juga dapat ikut berperan dalam menegakan dan melindungi hak PSK dengan menghargai dan menghormati hak PSK serta tidak melakukan kegiatan main hakim sendiri yang sangat merugikan PSK.

E. PENUTUP

Pekerja Seks Komersial merupakan kaum yang selalu mengalami perlakuan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari akibat status sosial mereka dalam masyarakat maupun akibat dari pilihan yang mereka lakukan. Adapun yang menjadi bentuk diskriminasi terhadap PSK antara lain secara hukum dan secara sosial.

Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Seks Komersial berdasarkan instrument nasional UUD 1945 dan UU 39/99 tentang HAM dan instrument internasional DUHAM, ICCPR, ICESCR dan CEDAW pelaksanaannya masih kurang sehingga PSK sering mengalami tindakan diskriminasi dan tidak bisa menikmati dan menjalankan hak mereka. Oleh karenanya diperlukan adanya peran pemerintah, LSM dan masyarakat demi adanya perlindungan HAM terhadap PSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar Ade Satyawan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Yuridis Empiris di Kabupaten Klaten), SKRIPSI, Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bambang Ali Kusumo, 1997, Kriminologi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi.
- Women Law & Development International dan Human Rights Watch Women's Right Project, Hak Asasi Manusia Langkah Demi Langkah (Panduan Praktis Menggunakan Hukum dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional Untuk Membela Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Edra Satmaidi, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Upaya Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Adat Program Magister Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

- Syafruddin, Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Medan, Makalah.
- Soedjono D, 1977, Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, Bandung : PT. Karya Nusantara.
- Kartini Kartono, 2001, Patologi Sosial, Jakarta: Rajawali.
- Bambang Sungono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Allan McChesney, 2003, Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Insist Press, Yogyakarta.
- Iwan Sain, S.Kp,M.Kes, Wanita Tuna Susila WTS atau Pekerja Seks Komersial, di post pada tanggal 24 Oktober 2007
- Syafruddin, Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakan Hukum, Makalah Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Medan.